



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang
Kode Pos 85118, e-mail: sma.disdikntt@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 848/01/PK/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ABDI KASIH BANGSA
KOTA KUPANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Memperhatikan :**
1. Surat Yayasan Pelita Kasih Bangsa Nomor : 07/YPKB/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas Abdi Kasih Bangsa
 2. Surat Kepala UPT Pendidikan Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 422/250/Pend/Wil.I/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pengajuan dan Permohonan Penerbitan Izin Pendirian SMA Abdi Kasih Bangsa di Kota Kupang
- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan permohonan Surat Yayasan Pelita Kasih Bangsa dan Surat Kepala UPT Pendidikan Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 422/250/Pend/Wil.I/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pengajuan dan Permohonan Penerbitan Izin Pendirian SMA Abdi Kasih Bangsa di Kota Kupang
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Kupang, maka perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Abdi Kasih Bangsa di Kota Kupang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Atas (SMA) Abdi Kasih Bangsa**, Jalan Jupiter II No. 1, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada Tahun Pelajaran 2018/2019;
- KETIGA : Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Bangsa secara bertahap berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 21 Februari 2023 dan setiap tahunnya akan di evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA keputusan ini, maka Izin operasional dapat di cabut sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 21 - 02 - 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610923 198603 1 012

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wali Kota Kupang di Kupang;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah I (Kota Kupang, Kab. Kupang & Kab. TTS) di Kupang.